

BAB 4

PEMBAHASAN

4.1 Profil Perpustakaan Kelurahan Tegal Parang (TP)

Perpustakaan Kelurahan Tegal Parang adalah suatu perpustakaan umum tingkat kelurahan yang terletak di Jalan Tegal Parang Selatan III Ujung, Kelurahan Tegal Parang, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan 12790. Ruang perpustakaanannya berlokasi di lantai satu kantor kelurahan Tegal Parang yang terdiri dari tiga lantai. Perpustakaan Kelurahan ini didirikan oleh Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Khusus Ibukota Jakarta (BPADKI), Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Jakarta Selatan (KPADJS), dan Kelurahan Wilayah. Pengelolanya bernama Ibu Ine Indra Suryarini Suyono M. Perpustakaan ini memiliki motto “Dengan membaca buku-buku yang berguna dan berbobot, kita akan berwawasan luas demi masa depan dan prestasi serta pengalaman-pengalaman yang tak ternilai harganya.”

4.1.1 Sejarah Berdirinya Perpustakaan Kelurahan Tegal Parang

Pada tahun 1992, Sekretariat PKK Kelurahan Tegal Parang mempunyai beberapa koleksi buku yang disimpan di perpustakaan PKK kelurahan. Kemudian pada tahun 1993, Lurah Tegal Parang memberikan tempat untuk adanya perpustakaan kelurahan. Tempat tersebut berada di Pelayanan Masyarakat di bagian depan lantai satu sebelah kiri. Untuk memperbanyak koleksi buku, perpustakaan kelurahan Tegal Parang mendapat bantuan dari Perpumda DKI, Dinas Pendidikan Wilayah, instansi pemerintah, donatur swasta, dan dari masyarakat yang peduli dengan perpustakaan.

4.1.2 Prestasi yang Pernah Diraih

Sebagai sarana pengawasan terhadap kinerja perpustakaan kelurahan, maka seringkali diselenggarakan lomba perpustakaan kelurahan terbaik. Perpustakaan Kelurahan Tegal Parang tercatat beberapa kali memenangkan perlombaan-perlombaan tersebut. Hal inilah yang menjadikan perpustakaan kelurahan ini menjadi perpustakaan kelurahan percontohan.

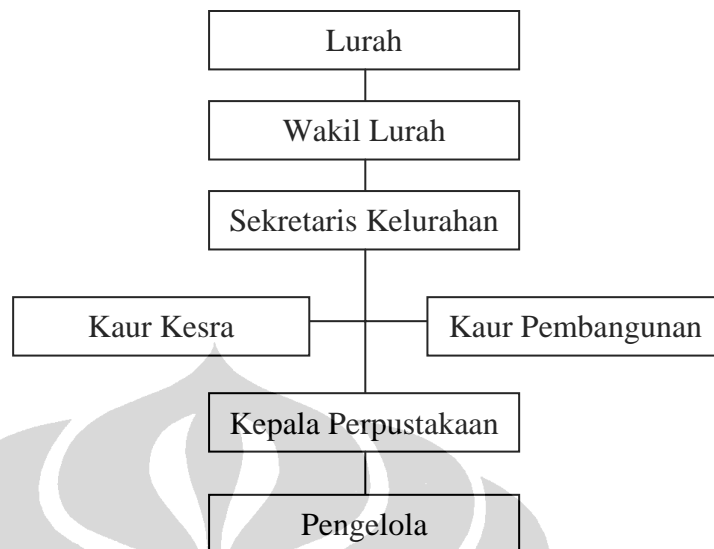
Tabel 1. Prestasi yang Pernah Diraih

No.	Tahun	Prestasi	Pembimbing
1	1993	Juara I Lomba Perpustakaan Kotamadya Jakarta Selatan	H. Hamin sebagai Lurah Tegal Parang
2	1995	Juara Harapan I Lomba Perpustakaan Tingkat Propinsi DKI Jakarta	H. Hamin sebagai Lurah Tegal Parang
3	1996	Juara I Lomba Perpustakaan Kotamadya Jakarta Selatan	H. Sumartono sebagai Lurah Tegal Parang
4	1999	Juara I Lomba Perpustakaan Kotamadya Jakarta Selatan	Atjep Sumarna, S.H. sebagai Lurah Tegal Parang
5	1999	Juara Terbaik I Pengelola Perpustakaan Tingkat Propinsi DKI	Atjep Sumarna, S.H. sebagai Lurah Tegal Parang
6	2002	Juara Terbaik I Lomba Administrasi Perpustakaan Tingkat Kecamatan Kotamadya Jakarta Selatan	Atjep Sumarna, S.H. sebagai Lurah Tegal Parang
7	2002	Juara I Lomba Perpustakaan Tingkat Kotamadya Jakarta Selatan	Atjep Sumarna, S.H. sebagai Lurah Tegal Parang
8	2002	Juara I Lomba Perpustakaan Tingkat Propinsi DKI Jakarta	Atjep Sumarna, S.H. sebagai Lurah Tegal Parang
9	2003	Sebagai Percontohan Perpustakaan Kelurahan	
10	2004	Juara Terbaik I Perpustakaan Percontohan	

Sumber: *Company Profile* Perpustakaan Kelurahan Tegal Parang

4.1.3 Struktur Organisasi Perpustakaan Kelurahan Tegal Parang

Struktur organisasi Perpustakaan Kelurahan Tegal Parang cukup berbeda dengan struktur organisasi perpustakaan kelurahan yang terdapat pada SK Gubernur No. 82 tahun 2004. Hal ini karena pendelegasian wewenang yang belum sempurna. Sampai saat penyusunan skripsi ini, struktur organisasi Perpustakaan Kelurahan Tegal Parang adalah sebagai berikut:

Bagan 2. Struktur Organisasi Perpustakaan Kelurahan Tegal Parang

Sumber: *Company Profile* Perpustakaan Kelurahan Tegal Parang

4.2 Analisis Keberlangsungan Perpustakaan kelurahan TP

Penelitian tentang keberlangsungan perpustakaan kelurahan ini dilakukan pada masing-masing pihak yang bersinggungan langsung dengan penyelenggaraan perpustakaan kelurahan. Kesimpulan setiap bagian ditampilkan pada bagian akhir.

4.2.1 Kekuatan

4.2.1.1 Pengelola/Sumber Daya Manusia (SDM)

Menurut pengelola Perpustakaan kelurahan TP yang peneliti wawancarai yaitu Ibu Ine Indra Suryarini (Ibu Ine), faktor utama penentu keberlangsungan suatu perpustakaan kelurahan ialah keberadaan seorang pengelola yang loyal terhadap tugasnya untuk mengembangkan perpustakaan kelurahan. Berkali-kali Ibu Ine menegaskan hal ini. Ibu Ine yang memang sudah lama berkecimpung dalam pengelolaan perpustakaan kelurahan, dari tahun 1993, memang cukup mengetahui banyak hal mengenai permasalahan yang dihadapi oleh perpustakaan kelurahan. Ibu Ine merupakan informan yang memenuhi kriteria bagi informan yaitu telah cukup lama dan intensif menyatu dengan kegiatan atau medan aktivitas yang menjadi informasi, melainkan juga menghayati secara sungguh-sungguh sebagai akibat dari keterlibatannya yang cukup lama dengan lingkungan atau

kegiatan yang bersangkutan. Ini biasanya ditandai oleh kemampuannya dalam memberikan informasi (hahal “di luar kepala”) tentang sesuatu yang ditanyakan.

Pendapat Ibu Ine didukung oleh pendapat Lurah TP yang bernama Abdul Kholit (Abdul) yang mengatakan bahwa perpustakaan tidak bisa hanya memiliki koleksi tapi tidak memiliki pengelola. Apalagi melihat perpustakaan kelurahan-perpustakaan kelurahan lain yang tidak memiliki pengelola yang loyal. Pak Abdul pun berujar “...*Hehe, karena memang sulit kita memiliki orang seperti Bu Ibu Ine. Udah ada dia mau begitu aja kita udah bersyukur. Karena kalau perpustakaan ada koleksi tapi nggak ada pengelola yang mau, gimana?*”

Pendapat kedua informan ini sejalan dengan teori Baderi (1996) yang mengatakan bahwa tujuan perpustakaan kelurahan akan tercapai apabila tiga faktor berikut berjalan dengan baik, yaitu pemakai, pengelola/pustakawan, dan fisik perpustakaan.

Selain loyal dalam mengelola, Ibu Ine mengatakan salah satu usaha yang dilakukannya selama ini untuk menyosialisasikan perpustakaan kelurahan ialah dengan berusaha meminta murid dan orang tua di PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) tempatnya mengajar untuk memanfaatkan perpustakaan kelurahan. Begitu pula dengan para pengajar PAUD agar mencari bahan ajar di perpustakaan kelurahan. Hal ini menjadi lebih mudah mengingat posisi Ibu Ine di PAUD tersebut adalah sebagai kepala PAUD. Usaha ini sesuai dengan usulan Sutarno (2008) yang menganjurkan pengelola perpustakaan kelurahan melakukan promosi, sosialisasi, dan publikasi, agar semua penduduk di desa/kelurahan itu mengetahui adanya perpustakaan. Masyarakat menjadi mengerti dan tertarik untuk berkunjung serta memanfaatkannya secara optimal. Sementara, ketika ditanya mengenai motivasi yang melatarbelakangi loyalitasnya terhadap perpustakaan kelurahan, Ibu Ine menjawab bahwa motivasi utamanya adalah tanggung jawab dan beban yang sudah diberikan kepadanya. Ibu Ine pernah berhenti mengelola perpustakaan kelurahan, namun banyak orang yang menanyakan karena membutuhkan informasi yang ada di perpustakaan kelurahan.

Ibu Ine bukanlah karyawan Kelurahan TP yang ditugaskan untuk menjaga perpustakaan kelurahan. Ibu Ine adalah salah satu pengurus PKK Kelurahan TP yang tidak terikat secara langsung dengan kelurahan. Hal ini memberikan dampak

yang positif dan juga negatif. Dampak positifnya, pengelola yang bukan sebagai karyawan tentunya dapat lebih fokus pada tugasnya sebagai pengelola perpustakaan kelurahan. Namun, di sisi lain, karena bukan merupakan karyawan kelurahan maka lurah tidak merasa berkewajiban membayar jasa yang sudah dilakukan oleh para pengelola perpustakaan kelurahan, dalam hal ini Ibu Ine. Inilah yang membuat Ibu Ine sempat memutuskan untuk berhenti menjadi pengelola perpustakaan kelurahan.

4.2.1.2 Kelengkapan Koleksi dan Sarana Prasarana

Menurut koordinator perpustakaan kelurahan dari KPADJS yaitu Ibu Ani, salah satu penarik minat masyarakat untuk mau berkunjung ke perpustakaan kelurahan adalah koleksi yang bagus. Ibu Ani juga menambahkan bahwa yang menyebabkan perpustakaan kelurahan TP dinilai bagus adalah *“Kemungkinan koleksinya banyak, sarana prasarana lengkap.”*

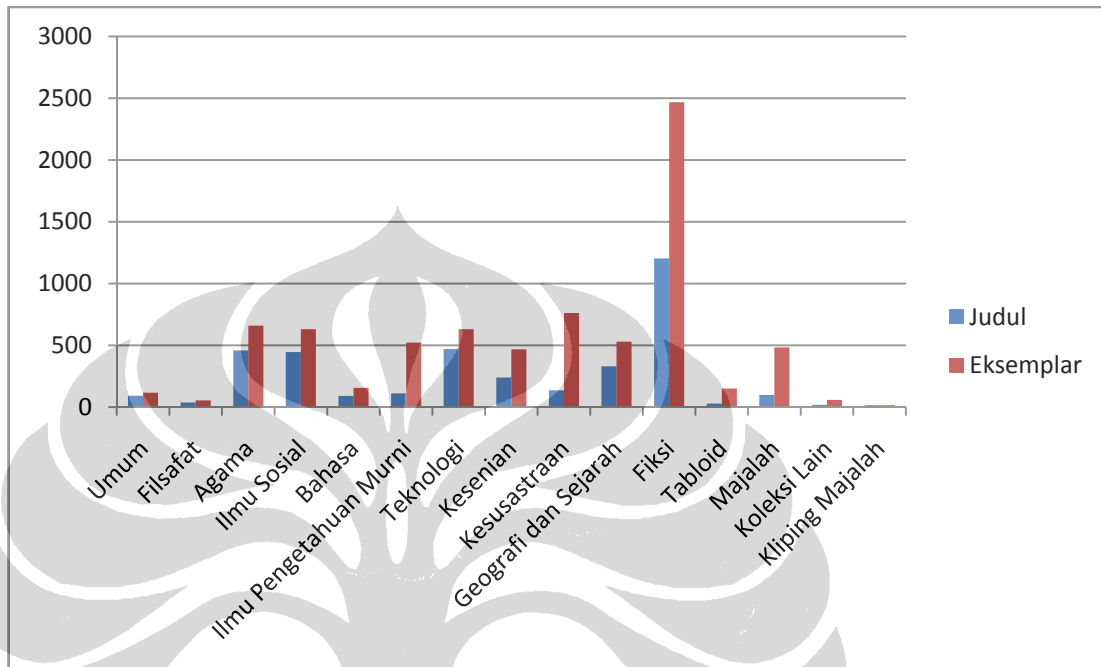
Di sisi lain, pengunjung juga berpendapat serupa. Pengunjung yang peneliti wawancarai bernama Siti. Siti mengatakan koleksi perpustakaan kelurahan TP cukup banyak dan bagus terutama koleksi buku ceritanya. Ini sangat sesuai dengan kebutuhannya sebagai seorang ibu yang membutuhkan buku cerita sebagai bahan dongeng bagi anaknya yang masih balita. Rinciannya sebagai berikut.

Tabel 1. Daftar Koleksi Buku

No.	Klasifikasi/Golongan	Jumlah	
		Judul	Eksemplar
1	Umum	92	116
2	Filsafat	38	54
3	Agama	459	659
4	Ilmu Sosial	446	631
5	Bahasa	91	156
6	Ilmu Pengetahuan Murni	112	522
7	Teknologi	470	631
8	Kesenian	239	468
9	Kesusatraan	136	762
10	Geografi dan Sejarah	330	530
11	Fiksi	1204	2468
12	Tabloid	28	150
13	Majalah	99	483
14	Koleksi Lain	18	58

15	Kliping Majalah	15	15
16	Jumlah Buku	3777	7703

Grafik 1. Daftar Koleksi Buku



Sumber: Laporan Triwulan (Januari-Maret 2009)

Apabila dibandingkan dengan perpustakaan kelurahan lain yang rata-rata hanya memiliki jumlah koleksi 1000-4000 eksemplar, tentunya jumlah ini dapat dikatakan cukup banyak. Mengenai hal ini, Ibu Ine menjelaskan bahwa walaupun pengadaan koleksi di Perpustakaan kelurahan TP tidak rutin, namun dalam setiap buku datang selalu dalam jumlah banyak. Sementara, sarana prasarana yang dimiliki oleh Perpustakaan kelurahan TP antara lain:

Tabel 2. Daftar Perabot

No.	Jenis Barang	Volume
1	Meja petugas	2
2	Kursi petugas	6
3	Meja baca	3
4	Kursi baca	20
5	Lemari buku	1
6	Rak buku	6
7	Rak majalah	1
8	Rak koran	2

9	Rak brosur/leaflet	1
10	Rak buku kamus/pedoman	1
11	Mesin tik	1
12	Papan nama perpustakaan	1
13	Papan pengumuman	1
14	Kotak katalog	1
15	Kipas angin	3
16	Jam dinding	1
17	Papan statistik	3

Sumber: Laporan Triwulan (Januari Maret 2009)

Koleksi dan sarana prasarana yang dimiliki oleh Perpustakaan kelurahan TP ini sudah lebih dari cukup apabila melihat SK Gubernur No. 82 tahun 2004 yang memberikan standar koleksi perpustakaan kelurahan sejumlah minimal 1500 judul atau 5000 eksemplar dengan komposisi 30% fiksi dan 70% nonfiksi. Untuk perabot, SK ini hanya menganjurkan perpustakaan kelurahan untuk memiliki meja dan kursi kerja, meja dan kursi petugas layanan, meja dan kursi baca (minimal untuk 10 orang pembaca), rak buku, rak surat kabar, rak majalah, dan lemari katalog. Dapat disimpulkan bahwa dalam hal koleksi dan sarana prasarana, Perpustakaan kelurahan TP memang sudah memenuhi persyaratan. Persis dengan apa yang dikatakan oleh Ibu Ani.

4.2.1.3 Pengunjung, Anggota, Pemakai Perpustakaan kelurahan

Dalam hal pengunjung, menurut Bapak Abdul, Perpustakaan kelurahan TP cukup sering dikunjungi. Hal ini terlihat dari jawabannya ketika ditanya mengenai pemanfaatan perpustakaan kelurahan Tegal Parang, ia menjawab “*Banyak cuma kekunci mulu, gimana?*”

Biasanya mereka datang di pagi dan sore hari karena menurut Ibu Ine, pengunjung perpustakaan kelurahan yang paling banyak adalah anak SD dan SMP yang ditugasi oleh guru. Sayangnya, hal ini tidak diikuti dengan bertambah banyaknya anggota. Dalam sebulan hanya beberapa orang yang mendaftar menjadi anggota baru. Begitu pula dengan yang meminjam buku. Keterangan mengenai jumlah pengunjung, peminjam, dan anggota pada tahun 2009 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4. Jumlah Anggota, Pembaca, dan Peminjam

No.	Bulan	Uraian Kegiatan					
		Jumlah Anggota Baru		Jumlah Pembaca di Perpustakaan		Jumlah Peminjam Buku	
		Dewasa	Anak2	Dewasa	Anak2	Dewasa	Anak2
1	Januari	-	-	48	30	4	1
2	Februari	2	-	64	50	4	-
3	Maret	-	1	84	75	4	6

Sumber: Laporan Triwulan (Januari-Maret 2009)

Ciri-ciri atau tanda bahwa perpustakaan bermanfaat antara lain: banyak aktivitas yang dilaksanakan di perpustakaan, ramai pengunjung dan tamu, banyak pembaca, dan banyak transaksi informasi (Sutarno, 2008). Dengan melihat kenyataan di lapangan dan mengaitkannya dengan teori Sutarno di atas, Perpustakaan kelurahan TP dapat dikatakan masih bermanfaat.

4.2.1.4 Lingkungan Perpustakaan

Selain yang telah disebutkan di atas, Perpustakaan kelurahan TP juga memiliki kekuatan dalam hal lingkungan yang mengelilinginya, baik lingkungan dalam kantor kelurahan yang menjadi tempat perpustakaan kelurahan bernaung mau pun lingkungan sekitar kantor kelurahan TP. Bapak Abdul mengatakan bahwa “*Mereka (karyawan kelurahan TP) mendukung-mendukung aja. Bahkan ada yang jadi anggota juga.*”

Bapak Abdul menjelaskan hubungan yang berjalan cukup baik antara Ibu Ine dengan karyawan Kelurahan TP. Bapak Abdul mengakui bahwa Ibu Ine terkadang suka bertindak yang kurang nyaman di hati karyawan, namun mereka berusaha untuk memaklumi sikap Ibu Ine tersebut karena Bapak Abdul merasa bersyukur masih memiliki Ibu Ine yang sudah mau mengelola perpustakaan kelurahan walaupun tidak digaji dan sempat merasa jenuh karena telah mengelola perpustakaan kelurahan selama bertahun-tahun.

Karena rasa jenuh ini maka Ibu Ine sempat memutuskan untuk berhenti menjadi pengelola Perpustakaan kelurahan TP. Dalam masa vakum, ternyata terdapat orang-orang yang menanyakan keberlangsungan Perpustakaan kelurahan TP sehingga akhirnya Ibu Ine kembali mengelola Perpustakaan kelurahan TP. Hal

ini menunjukkan bahwa orang-orang yang berada di lingkungan sekitar Kelurahan TP masih menginginkan keberadaan Perpustakaan kelurahan TP. Lokasi kelurahan yang menjadi tempat bernaung perpustakaan kelurahan berada di tengah-tengah pemukiman sehingga cukup memudahkan masyarakat datang ke perpustakaan kelurahan, begitulah penjelasan dari Bapak Abdul. Apalagi ruangnya yang terletak di lantai satu membuat pengunjung kelurahan yang pada awalnya kemungkinan hanya berniat mengurus kepentingan yang berurusan dengan kependudukan, akhirnya berkunjung ke perpustakaan kelurahan sambil menunggu selesainya urusan mereka. Kondisi lingkungan seperti ini memenuhi persyaratan lokasi perpustakaan kelurahan yang baik, sebagaimana dijelaskan oleh Sutarno (2006) bahwa lingkungan yang baik ikut memberikan andil dalam penyelenggaraan perpustakaan. Lingkungan tersebut antara lain lokasi yang strategis, mudah dikenal dan dijangkau masyarakat, bebas banjir, bersih, tenang, sehat, dan terdapat akses kendaraan. Lingkungan yang demikian merupakan salah satu faktor yang berpengaruh positif kepada perpustakaan, sehingga langsung atau tidak, merupakan kekuatan pendukung.

4.2.1.5 Mitra Perpustakaan

Sebenarnya perpustakaan desa/kelurahan memiliki banyak sumber pengadaan buku tergantung kepada bagaimana koordinasi setiap instansi serta kelincahan petugas perpustakaan desa (Sulistyo-Basuki, 1994). Oleh karena itu, untuk kegiatan pengadaan koleksi, Perpustakaan kelurahan TP menjalin kerja sama dengan beberapa instansi yang terkait, antara lain:

1. KPADJS

Pada awal pendiriannya, pengelola Perpustakaan kelurahan TP berusaha menjalin kerja sama dengan pihak KPADJS. KPADJS sebagai pembina perpustakaan kelurahan memiliki program bantuan berupa koleksi atau perabot bagi perpustakaan kelurahan yang baru didirikan, terutama perpustakaan kelurahan yang berada di wilayah binaannya di Jakarta Selatan. Perpustakaan kelurahan yang dibina ini diberikan kebebasan untuk memilih apakah membutuhkan bantuan dalam bentuk koleksi atau dalam bentuk perabot. Perpustakaan kelurahan tidak bisa meminta keduanya karena

keterbatasan yang dimiliki KPADJS. Pemberian bantuan ini, terutama yang berbentuk koleksi, tidak diberikan secara rutin. Namun, apabila perpustakaan kelurahan meminta buku-buku yang dibutuhkan masyarakat maka KPADJS akan mengusahakan walaupun tidak dalam jumlah banyak. Informasi ini dibuktikan oleh pernyataan Ibu Ine yang berkata “...*Trus.. jadi gini lho koleksi buku qt intinya yang ngasih itu adalah dari perpumda tapi itu tidak tiap taun. Jadi klo perpumda dah ngasih mebel, mereka tidak ngasih buku. Ya tergantung dari qt, qta kan di triwulan laporan gini gini gini, warga banyak senang buku ini. Nanti qt dikirim yang permintaan dia...*” Buku yang didapat dari KPADJS biasanya “*DIKASIIH..dikasih kita didrop udah rapi, udah dikemasin, udah ditemelin itu. terakhir dapat tuh tahun 2006.*”

2. BPPT

Sebelum menjadi pengelola perpustakaan kelurahan TP, Ibu Ine bercerita bahwa “...*Aku kan aktif di BPPT, ICMI. Aku minta ke Pak Habibi, terus dapet buku-bukunya Pak Habibi , 50 tahun Pak Habibi, yang ristek segala macem itu...*” Pada saat bekerja di sana, Ibu Ine seringkali mendapat giliran bertugas di Perpustakaan BPPT sehingga ketika merintis pendirian Perpustakaan kelurahan TP, ia pun mengajukan permohonan untuk meminta beberapa koleksi Perpustakaan BPPT. Koleksi-koleksi itu rata-rata menceritakan tentang atau pun milik Bpk. Habibi. Beberapa di antaranya terdapat pula koleksi ICMI (Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia).

3. Lions Club

Lions Club merupakan salah satu lembaga sosial yang memang sering mengadakan bantuan bagi yang membutuhkan terutama anak-anak yatim piatu. Ibu Ine yang memang bertindak sebagai pengurus PKK yang bertugas mengurus persoalan anak yatim di wilayah TP tentunya secara tidak langsung turut menjadi salah satu relawan Lions Club. Oleh karena itu, Ibu Ine tidak menyia-nyikan kesempatan untuk mendapatkan bantuan bagi Perpustakaan kelurahan TP. Lions Club memiliki suatu tradisi untuk mengadakan acara bantuan dalam setiap kegiatan seremonialnya seperti misalnya setiap hari jadi Lions Club. Ibu Ine pun berujar “...*Trus aq kerja sama sama LSM itu Lions Club itu setiap datang selalu bawa buku2 klo dia ada acara seremonialnya*

dia, bakti sosial. satu kebanggaan di ngasih lho mba.” Untuk itu, Ibu Ine mencoba mengajukan permohonan bantuan dalam bentuk koleksi untuk Perpustakaan kelurahan TP.

4. Jakarta Japan Network (JJN)

JJN merupakan pihak yang paling baru dalam memberikan bantuan kepada Perpustakaan kelurahan TP. JJN juga membantu dalam bentuk koleksi. Untuk menegaskan informasi ini, Ibu Ine mengatakan bahwa *“Kemarin dapet lagi dari yang Jakarta Japan Network, dapet.”*

5. Masyarakat setempat

Semua instansi di atas memberikan bantuan secara tidak rutin. Satu-satunya yang memberikan bantuan secara rutin setiap tahun sekali hanyalah masyarakat setempat. Biasanya sumbangan dari masyarakat ini dilakukan setiap awal tahun ajaran baru di sekolah. Buku-buku yang datang dari masyarakat ini kemudian diseleksi untuk memilih buku-buku yang masih layak dan dijadikan koleksi perpustakaan kelurahan. Penyeleksian ini dilakukan karena biasanya buku-buku yang diterima dari masyarakat ini adalah buku-buku lama yang sudah tidak dibutuhkan oleh si pemberi *“...karena dari rumah ke rumah itu kan buku pelajaran kan ada yang tidak masuk kurikulum gitu lho. Nah itu dikasih ke qt. Kuseleksi..yang bisa dipampangin masuk ke buku induk. Klo tidak ya sudah, la wong namanya pemberian. Ya qt terima, jadikan itu uang. Maksudnya kalo dibuang gitu aj kan sayang. Seperti kemaren ditimbang, bisa jadi buat lem.”* Ciri-ciri buku yang berasal dari pemberian masyarakat biasanya tidak bernomor panggil.

Dapat dilihat bahwa pengelola tetap memperhatikan kualitas koleksi perpustakaan kelurahan, jadi tidak hanya mementingkan jumlah yang banyak. Sayangnya ketika penelitian ini dilakukan, perpustakaan ini tidak sedang menjalankan penerimaan buku dari masyarakat maupun dari penyumbang-penyumbang lainnya.

Menurut Sutarno (2006), mitra kerja atau *‘partner’* perpustakaan adalah semua pihak yang terlibat langsung dan tidak langsung di dalam penyelenggaraan perpustakaan. Organisasi atau lembaga yang dapat diajak bekerja sama antara lain penerbit (IKAPI), toko buku terutama yang tergabung dalam Gabungan Toko

Buku Indonesia (Gatbi), agen, distributor, dan penyedia sumber-sumber informasi dan koleksi bahan pustaka, pemerintah dan swasta, khususnya yang bidang kegiatannya sama/hampir sama, yaitu bidang informasi, pendidikan, penelitian, dan pengembangan budaya, masyarakat pemakai perpustakaan, sekolah, dan kelompok-kelompok tertentu lainnya. Masih menurut Sutarno (2008), pengadaan dan pengembangan koleksi, penyandang dana, perhatian dan kepedulian masyarakat terhadap kondisi perpustakaan desa/kelurahan dapat dilakukan, misalnya dengan wakaf buku. Dari teori ini, bisa dilihat bahwa Perpustakaan kelurahan TP sudah berusaha menjalin mitra kerja sama terutama dalam hal pengadaan koleksi. Akan tetapi, memang sejauh ini masih belum bisa dikatakan maksimal.

4.2.1.6 Kondisi, Persebaran, Jangkauan Layanan Perpustakaan

“Pengunjung perpustakaan memang tidak duduk berjam-jam, karena memang ditujukannya berdiri misalnya di dekat sekolah untuk dimanfaatkan. Perpustakaan ini dekat dengan SMIP 28 Oktober, SD sini ada 7 lho TP, semua anggota sini.” Inilah yang dikatakan oleh Ibu Ine ketika ditanyakan perihal pemanfaatan Perpustakaan Kelurahan Tegal Parang.

Oleh karena itu, Perpustakaan kelurahan TP mengadakan layanan paket ke sekolah dan kelurahan yang tidak mendapatkan pemberian buku dari KPADJS. Layanan paket adalah layanan pinjam koleksi dari KPADJS kepada perpustakaan-perpustakaan yang ada di tengah masyarakat dan membutuhkan bantuan pasokan koleksi. Sekolah yang dipinjamkan antara lain SMP 104 Mampang, SMP 247, dan SMP 43. Perlu diperhatikan bahwa sekolah-sekolah ini tidak benar-benar berdekatan dengan Perpustakaan Kelurahan TP. Peraturan layanan ini dijelaskan oleh Ibu Ine *“Aku pinjamkan selama 3 bulan, aku taruh di tempat yang minjam. Mereka boleh meminjamkannya lagi ke orang2 yang memang anggota mereka. Perpustakaan dan sekolah yang meminjam juga harus konsekuen untuk ngembaliin ke sini 3 bulan kemudian.”*

Buku yang biasa dipinjamkan adalah buku cerita karena buku pelajaran harganya mahal. Itulah yang dungkapkan oleh Ibu Ine ketika ditanya perihal usaha yang sudah dilakukannya dalam rangka memperluas pemanfaatan koleksi

perpustakaan kelurahan. Namun, ia mengaku tidak mendapatkan layanan paket ini dari KPADJS.

Layanan yang diberikan oleh Perpustakaan kelurahan TP kepada perpustakaan-perpustakaan di sekitarnya ini sejalan dengan apa yang disampaikan Sutarno (2006) yang menganjurkan perluasan jangkauan layanan yang meluas dan merata ke semua wilayah desa/kelurahan tersebut sebagai salah satu cara memperluas pemanfaatan koleksi perpustakaan kelurahan. Karena apabila perpustakaan kelurahan hanya menunggu kedatangan pengunjung maka koleksi perpustakaan kelurahan tidak akan dimanfaatkan secara maksimal.

Permasalahan pada perpustakaan umum kecil harus dihadapi dengan beberapa pendekatan. Untuk memberdayakan koleksi yang dimilikinya, pengelola perpustakaan harus bekerja sama dengan para guru dan petugas sekolah dalam rangka membantu para siswa, namun ia tidak diizinkan untuk hanya fokus pada pelayanan terhadap siswa apalagi sampai menurunkan layanan terhadap orang dewasa (Sinclair, 1979).

4.2.1.7 Administrasi

Ibu Ine selalu membanggakan kegiatan administrasi yang dilakukannya. Menurutnya, selama ini, ia sudah melaksanakan kegiatan administrasi sebaik mungkin dengan tidak pernah menumpuk pekerjaan. Kelancaran kegiatan administrasi ini didukung dengan kelengkapan administrasi yang ada.

Dengan kelengkapan administrasi, tentunya akan sangat memudahkan Ibu Ine menjalankan tugas administrasinya yang penting yang apabila tidak dikerjakan dengan benar maka justru dapat menghambat kinerja perpustakaan. Sebagaimana yang disampaikan Sutarno (2006) bahwa administrasi dirasakan sangat penting di dalam setiap proses kegiatan perpustakaan, sehingga faktor administrasi dapat menjadi salah satu titik kelemahan perpustakaan. Hal tersebut menjadi tanggung jawab utama seorang administrator atau kepala perpustakaan dan unsur pembina lainnya. Supaya di dalam setiap tahap kegiatan tercipta tertib administrasi. Berikut ini daftar kelengkapan administrasi Perpustakaan kelurahan TP.

Tabel 4. Kelengkapan Administrasi

No.	Jenis Barang	Volume	Keterangan
1	Buku induk	10	
2	Buku inventarisasi	1	
3	Buku tamu	2	
4	Buku pengunjung	-	Habis
5	Buku anggota	2	
6	Buku ekspedisi	1	
7	Buku agenda	1	
8	Kartu anggota	-	Habis
9	Bak stempel	2	Perlu tinta
10	Stempel	1	
11	Kantong buku	-	Habis

Sumber: Laporan Tiwulan (Januari-Maret 2009)

4.2.2 Kelemahan

4.2.2.1 Sumber Daya Manusia (SDM)

Selama ini, perpustakaan kelurahan sering dijumpai tutup dan tidak beroperasi. Peneliti mencoba menanyakan hal ini kepada Ibu Ine. Ibu Ine menjelaskan bahwa dirinya sebagai seorang pengelola perpustakaan kelurahan yang juga memiliki kegiatan lain di luar, seperti mengajar PAUD dan sebagai pengurus PKK, mengaku dirinya tidak bisa 100% terus-menerus menjaga perpustakaan kelurahan sesuai dengan jam buka perpustakaan kelurahan. Peneliti juga menyaksikan sendiri di awal-awal peneliti datang ke Perpustakaan Kelurahan TP, peneliti selalu menemukan perpustakaan dalam keadaan tutup walaupun sebenarnya sudah masuk jam buka perpustakaan. Kendala yang sama juga dialami oleh para pengelola perpustakaan kelurahan-perpustakaan kelurahan lain, baik mereka yang menjabat sebagai karyawan kelurahan mau pun mereka yang tidak terikat secara langsung dengan kelurahan seperti Ibu Ine.

Para pengelola yang merangkap kerja sebagai karyawan kelurahan biasanya sulit membagi konsentrasi antara pekerjaan inti mereka sebagai karyawan kelurahan dan tugas mengelola perpustakaan kelurahan. Apalagi karyawan kelurahan yang biasanya ditunjuk untuk menjadi pengelola perpustakaan adalah karyawan yang kinerjanya tidak terlalu baik di kelurahan. Sementara itu, para pengelola yang merupakan orang luar kelurahan biasanya

mengalami kendala dalam hal waktu. Mereka tidak dapat mengandalkan tugasnya sebagai pengelola perpustakaan kelurahan karena mereka tidak mendapat bayaran dari tugasnya ini. Padahal sebagai manusia mereka membutuhkan penghasilan, terutama bagi para pengelola yang laki-laki karena mereka harus menghidupi keluarganya. Menurut Ibu Ine, “...seharusnya lurah menunjuk orang yang bukan staf untuk mengelola perpustakaan, tapi ya Pak Lurah harus konsekuen dong. Sudah menunjuk orang kan bukan hanya untuk duduk manis seperti ini, kita kan juga mendambakan uang.” . Kenyataan ini tidak bisa disalahkan.

Ditanya mengenai kondisi yang terjadi seperti ini, Bapak Abdul menyadari sepenuhnya kendala tersebut. Ia pun sebagai lurah yang menjadi penanggung jawab perpustakaan kelurahan mengaku turut bertanggung jawab terhadap kondisi demikian. Bapak Abdul pun mengaku berniat sekali untuk menambah satu orang untuk membantu Ibu Ine, apalagi sebelumnya Ibu Ine memang dibantu oleh seorang staf. Namun, pada akhirnya, staf itu pun memutuskan untuk mengundurkan diri. Menurut Bapak Abdul, sulit juga mencari orang yang mau menjadi pengelola perpustakaan kelurahan karena sekarang ini semua orang tidak mau bekerja apabila tidak dibayar.

Seharusnya perpustakaan sekecil apa pun harus memiliki satu orang pengelola yang digaji. Penggajian ini diharapkan dapat menimbulkan rasa tanggung jawab untuk mengembangkan perpustakaan. Selain itu penggajian terhadap pengelola memberikan kejelasan tanggung jawab sehingga akan tercipta pengelolaan yang lancar dan hubungan kerja yang stabil (Gervasi, 1988).

Kondisi SDM seperti ini sudah jelas tidak sesuai dengan anjuran gubernur dalam SK Gubernur No. 82 tahun 2004 Bab III pasal 3 yang berbunyi:

Penyelenggara perpustakaan kelurahan dilakukan oleh pengurus perpustakaan dengan susunan sebagai berikut:

Penanggung Jawab	: Lurah
Ketua Pelaksana	: Staf Kelurahan (PNS)
Sekretaris	: PKK Kelurahan
Urusan-urusan	:

c. Urusan Layanan dan pemasyarakatan: PKK/Karang Taruna

d. Urusan Administrasi dan Pengolahan: PKK/Karang Taruna

4.2.2.2 Sumber Koleksi

Dari hasil wawancara terhadap Ibu Ine dan Ibu Ani, peneliti mendapat informasi bahwa ternyata perpustakaan kelurahan tidak memiliki sumber yang tetap dalam pengadaan koleksi. Ibu Ani mengatakan bahwa *“Perpustakaan kelurahan menyediakan sendiri, kita tidak menyediakan. Kita kan nggak ada anggaran untuk membelikan buku ke sana, jadi kita hanya membina pengelolanya aja. Inilah yang menjadi penyebab perpustakaan sulit maju. Sebenarnya masalah dana bukan yang utama, yang penting adalah adanya payung hukum yang jelas. Makanya sekarang kita sedang berusaha menyusun peraturan yang lebih jelas ini.”*

KPADJS memang memiliki layanan paket, namun layanan ini hanya diperuntukkan bagi perpustakaan yang didirikan berdasarkan swadaya masyarakat seperti misalnya taman baca di RW-RW dan tidak diperuntukkan bagi perpustakaan kelurahan yang memang diharapkan justru dapat memberikan layanan paket ini kepada taman-taman baca di lingkungannya. Ibu Ani pun menjelaskan lebih lanjut bahwa *“Layanan paket itu tidak ada di kelurahan. Adanya di seperti taman bacaan. Jadi layanan peminjaman buku tiga bulan sekali kita ganti. Ada layanan paket di sini juga tapi cuma untuk taman bacaan. Memang aturannya seperti itu. Di sini kan ada layanan paket, layanan keliling. Jadi layanan paket ini untuk tempat yang jauh dari kelurahan. Misalnya suatu tempat punya taman bacaan atau satelit, biasanya dari prakarsa masyarakat. Nah kalo mereka mendirikan taman bacaan kan melapor ke sini, jadi kita sediakan layanan paket itu. Itulah, makanya seharusnya ada sponsor yang tetap. Lurah juga tidak merasa ada beban dengan tidak adanya perpustakaan di kelurahan mereka.”*

Dalam usaha mencari sponsor atau donatur, Perpustakaan kelurahan TP sudah beberapa kali mencoba dan seperti telah diuraikan sebelumnya, Perpustakaan kelurahan TP cukup berhasil mendapat bantuan dari beberapa pihak. Namun, sayangnya tidak ada yang berkenan memberikan bantuan secara rutin. Satu-satunya pihak yang mengirimkan wakaf buku setahun sekali hanya

masyarakat sekitar itu pun atas imbauan lurah setempat. Biasanya masyarakat mengirimkan buku pada awal tahun ajaran baru, di saat anak-anak mereka sudah tidak membutuhkan buku mereka yang lama. Ibu Ine menggambarkan setiap kali buku datang, perpustakaan kelurahan tiba-tiba saja terlihat seperti gudang buku karena buku-buku yang berasal dari masyarakat ini lebih banyak merupakan buku-buku bekas yang memang sudah tidak dibutuhkan oleh pemilik sebelumnya. Hal ini menyebabkan kurang berkualitaskannya koleksi yang ada di perpustakaan kelurahan dalam artian kurang dalam hal kebaruan. Ibu Ani berpendapat kondisi koleksi yang kurang bermutu ini menjadi salah satu sebab kurangnya minat masyarakat untuk memanfaatkan perpustakaan kelurahan. Apalagi minat masyarakat terhadap perpustakaan memang sudah rendah.

Menjawab permasalahan ini, Ibu Ine menjelaskan bahwa ia masih melakukan seleksi terlebih dahulu terhadap buku-buku yang diberikan tersebut dan tidak begitu saja memasukkannya menjadi koleksi perpustakaan kelurahan. Ibu Ine memilih buku-buku yang masih layak pakai dari segi fisik dan juga isi, buku-buku yang sekiranya dapat bermanfaat bagi kebutuhan masyarakat wilayahnya yang terkenal sebagai gudang konveksi di Jakarta Selatan, dan juga buku-buku yang tahun terbitnya belum terlalu lama. Persyaratan selanjutnya yaitu *“yang masih bisa dipakai, dimanfaatkan. Dan walopun dia taun lama, dia kan masih bisa dijadikan satu pegangan. Sejarah kan taun kapan aj bisa dipajang. terakhir dapet dari masyarakat taun ajaran kemaren taun 2008. Biasanya qt dapat bulan juli, agustus, september, oktober dari ibu2 yang anaknya naik kelas.”*

Kemudian, terhadap buku-buku yang tidak lolos seleksi, Ibu Ine mengaku tidak lantas membuang atau menyia-nyiakannya begitu saja. Begitu pula dengan koleksi-koleksi yang sudah lama menjadi koleksi perpustakaan namun sudah tidak relevan lagi dengan kondisi sekarang (misalnya masih terdapat buku ebtanas SD tahun 2000 dan majalah-majalah terbitan tahun 90-an), Ibu Ine memilih untuk menjualnya dan uang hasil penjualan itu dipakai untuk membeli perlengkapan yang dibutuhkan perpustakaan, seperti misalnya lem, alat tulis, dsb. Mengingat keterbatasan yang dihadapi oleh perpustakaan kelurahan ini maka tidak Ibu Ine dapat dikatakan cukup bijaksana. Ia pun cukup bangga dengan kondisi

perpustakaan dan dengan usaha yang telah dilakukannya. Walaupun sebenarnya banyak

4.2.2.3 Pengawasan dan Pembinaan

Seluruh pertanyaan menyangkut pengawasan dan pembinaan perpustakaan kelurahan ditanyakan kepada Ibu Ani karena tugas ini merupakan tanggung jawab KPADJS. Menurut penjelasan Ibu Ani, tugas pengawasan dan pembinaan perpustakaan kelurahan memang menjadi tanggung jawab KPADJS. Tanggung jawab ini tertera dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2007-2012, tepatnya pada bagian Urusan Wajib poin z mengenai Urusan Perpustakaan nomor 3 yaitu Program Pengembangan Perpustakaan Jakarta yang isinya berbunyi sebagai berikut:

Indikator kinerja yang akan dicapai antara lain: Terbangunnya kinerja perpustakaan Jakarta yang memenuhi standar internasional, dan pembinaan perpustakaan di tingkat kelurahan.

Tugas pembinaan ini sudah dijalankan semenjak beberapa tahun yang lalu, namun pada beberapa tahun terakhir kinerjanya memang menurun dan kurang efektif. Kurang maksimalnya kinerja pengawasan dan pembinaan perpustakaan kelurahan di waktu yang lalu inilah salah satu penyebab mundurnya kondisi perpustakaan kelurahan sekarang ini. Oleh karena itu, Ibu Ani yang baru mulai menjabat sebagai koordinator perpustakaan kelurahan semenjak 30 Januari 2009 ini mengaku sedang berupaya untuk memperbaiki kembali kekurangan-kekurangan yang terjadi selama ini.

Ibu Ani menjelaskan bahwa *“Ada restrukturisasi organisasi di bagian pembinaan saya. Kalau dulu kan, pelayanan dan pemasyarakatan. Pelayanan perpustakaan tuh kaya’ layanan keliling, mana lagi tuh? Layanan keliling itu ke titik-titik...tempat umum yang jauh dari perpustakaan umum di sini. Terus yang kelurahan ada juga, cuma mungkin kurang optimal mungkin dulu.”* Lembaga-lembaga pemerintahan memang baru saja melakukan restrukturisasi karyawan pada akhir Januari 2009. Dalam proses restrukturisasi ini, banyak dilakukan

pembenahan-pembenahan terhadap kinerja karyawan dan perampingan struktur. Unit-unit yang memiliki kemiripan fungsi kini digabung, seperti halnya yang terjadi pada KPADJS ini. Sebelumnya, KPADJS hanya mengurus bidang perpustakaan. Namun, sekarang, selain mengurus bidang perpustakaan, KPADJS turut mengurus bidang arsip. Hal ini diikuti dengan perubahan nama yang sebelumnya hanya Kantor Perpustakaan Umum Daerah Jakarta Selatan atau masyarakat lebih mengenalnya dengan Perpumda Jaksel. Sekarang diubah menjadi Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Jakarta Selatan (KPADJS).

Sebelumnya, KPADJS terdiri dari tiga bagian, yaitu bagian pelayanan, pengembangan, dan administrasi (TU). Dari ketiga bagian ini, pembinaan perpustakaan kelurahan menjadi urusan bagian pelayanan yang dijabat oleh Bapak Rahman. Pada bagian pelayanan ini selain urusan perpustakaan kelurahan juga ada urusan perpustakaan keliling. Setelah restrukturisasi, KPADJS tetap terdiri dari tiga bagian, namun terdapat sedikit perbedaan. Bagian administrasi kini sudah tidak ada lagi dan diganti dengan bagian pembinaan. Tanggung jawab pengawasan dan pembinaan perpustakaan kelurahan pun dialihkan, yang sebelumnya berada di bawah tanggung jawab bagian pelayanan, kini berada di bawah tanggung jawab bagian pembinaan.

Peralihan jabatan ini berakibat pada belum optimalnya usaha pembinaan perpustakaan kelurahan karena dalam jangka waktu empat bulan ini Ibu Ani belum banyak melakukan tindakan. Ibu Ani mengaku baru melakukan survei ke tiga perpustakaan kelurahan, dua di antaranya yaitu Perpustakaan Kelurahan Kebayoran Lama Utara dan Perpustakaan Kelurahan Manggarai Selatan. Kurangnya survei ini membuat Ibu Ani belum terlalu memahami sepenuhnya kondisi yang sebenarnya di lapangan. Sejauh ini, Ibu Ani hanya mengandalkan laporan triwulan yang diberikan oleh masing-masing pengelola perpustakaan kelurahan kepada dirinya. Dari laporan itu, dinyatakan bahwa perpustakaan-perpustakaan kelurahan yang terdaftar di KPADJS masih aktif beroperasi. Padahal, pada awal penelitian, peneliti menyempatkan diri untuk meninjau beberapa perpustakaan kelurahan dan kenyataannya lebih banyak yang tidak jelas keberadaannya daripada yang masih beroperasi. Ironisnya, para pengelola dari perpustakaan yang sudah tidak jelas keberadaannya itu selalu datang tiap kali

penyerahan laporan triwulan. Mereka datang untuk mengambil dana insentif bagi para pengelola perpustakaan kelurahan.

Kekurangpahaman Ibu Ani terhadap kondisi yang sebenarnya di lapangan terlihat ketika peneliti menanyakan perihal lomba perpustakaan kelurahan yang beberapa tahun lalu sering diadakan setiap tahun, namun belakangan ini tidak pernah diadakan lagi. Ibu Ani menjelaskan kendala yang menyebabkan dirinya belum sempat melakukan survei ke perpustakaan-perpustakaan lain karena harus mengurus pekerjaan lain yang menyita waktu, antara lain perlombaan PKK yang menurut Ibu Ani sebenarnya tidak terlalu terkait dengan tanggung jawab pekerjaannya. Namun, Ibu Ani mengakui bahwa beberapa di antara penyebab banyaknya perpustakaan kelurahan yang berguguran adalah karena pendirian perpustakaan kelurahan yang dilakukan dalam jumlah banyak tidak diikuti dengan pengawasan dan pemberian insentif yang memadai sehingga banyak pengelola yang kekurangan motivasi.

Usaha yang dimulai setengah-setengah apabila perpustakaan desa/kelurahan ditinggalkan tanpa pemikiran pengadaan dana lebih lanjut maka pada jangka panjang akan mematikan minat baca penduduk desa/kelurahan serta mengakibatkan citra yang kurang baik mengenai perpustakaan di antara penduduk desa/kelurahan. Pembentukan perpustakaan desa/kelurahan perlu diikuti dengan cara memperoleh dana, jika tidak perpustakaan akan merana dan akan ditinggalkan pemakainya (Sulistyo-Basuki, 1994).

4.2.2.4 Sumber Dana

Peraturan mengenai sumber dana untuk perpustakaan kelurahan sebenarnya sudah tertera dalam SK Gubernur No. 82 tahun 2004 tentang Perpustakaan Kelurahan, tepatnya pada Bab V pasal 12 yang berbunyi:

1. Sumber pembiayaan penyelenggaraan Perpustakaan Kelurahan diperoleh dari Anggaran Pemerintah dan Pengeluaran Keuangan Kelurahan (APPKK), dan bantuan dari kantor Perpustakaan Umum Daerah propinsi DKI Jakarta dan Kantor Perpustakaan Umum Kotamadya/Kabupaten.

2. Perpustakaan kelurahan juga diperbolehkan menerima sumbangan dana dari pihak lain yang sah dan tidak mengikat atau berupa buku-buku maupun perlengkapan teknis perpustakaan lainnya.

Namun, Bapak Abdul mengaku tidak tahu menahu tentang peraturan ini. Bahkan Bapak Abdul menyangka perpustakaan kelurahan merupakan tanggung jawab KPADJS. Ketika ditanya mengenai hal ini, ia menjawab *“Ya tanggung jawab perpumda?! emang anggarannya dari mana? Kita kan nggak ada.”*

Bapak Abdul juga tidak mengetahui bahwa sumber pendanaan bagi perpustakaan kelurahan salah satunya berasal dari Anggaran Pemerintah dan Pengeluaran Keuangan Kelurahan (APPKK). Menurut Bapak Abdul, APPKK ini sudah tidak ada semenjak Juli 2006. Oleh karena itu, kelurahan menarik sumbangan dari masyarakat dalam bentuk bantuan buku untuk perpustakaan kelurahan karena kelurahan tidak memiliki anggaran untuk itu.

Bapak Abdul mengusulkan dilakukannya revisi terhadap SK Gubernur tersebut karena sudah tidak relevan dengan kondisi yang ada saat ini. APPKK sudah diganti dengan DAS. DAS ini merupakan anggaran kelurahan yang hanya mengalokasikan dana yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) kelurahan. Sementara, perpustakaan bukan menjadi tupoksi kelurahan. Oleh karena itu, seharusnya KPADJS dapat membuat anggaran untuk perpustakaan kelurahan karena lebih sesuai dengan tupoksi KPADJS. Apalagi KPADJS merupakan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dan dia berlaku sebagai KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) sehingga sudah menjadi hak KPADJS untuk membuat anggaran untuk perpustakaan kelurahan dan mengajukannya. Sementara, kelurahan tidak berhak melakukan itu.

Bapak Abdul sebagai Lurah TP mengaku tidak keberatan untuk memberikan dana kepada perpustakaan kelurahan asalkan peraturannya diperjelas terlebih dahulu, terutama yang berhubungan dengan kewenangan kelurahan terhadap perpustakaan yang bernaung di wilayahnya agar ada dana yang dapat dianggarkan. Apabila tidak ada kewenangan yang jelas maka kelurahan akan kesulitan memperoleh dana dari pemerintah atas. Kalau hanya itikad tanpa adanya dana yang konkret maka tetap saja sulit karena apabila kelurahan mengeluarkan dana di luar tupoksinya maka kelurahan dapat dikenakan sanksi pelanggaran.

Sementara itu, di sisi lain kelurahan menghadapi tuntutan untuk menambah pengelola perpustakaan kelurahan sehingga dapat membantu Ibu Ine dan untuk mempekerjakan orang tentunya membutuhkan dana. Itu pun kalau perpustakaan kelurahan memang masih dibutuhkan karena selama ini pengunjungnya terbatas. Namun, menurut Bapak Abdul, yang penting saat ini adalah mengusahakan agar perpustakaan kelurahan dimanfaatkan sebaik mungkin.

Untuk memperjelas soal pendanaan yang disampaikan oleh Bapak Abdul, peneliti mencoba melakukan konfirmasi kepada Ibu Ani. Ibu Ani mengatakan bahwa KPADJS memang memberikan dana dalam bentuk insentif dalam kepada para pengelola perpustakaan kelurahan, namun jumlah dananya memang tidak seberapa. selama ini hanya dapat menjalankan rencana yang dianggarkan dari tahun 2008 Insentif ini diberikan dalam rangka tanda terima kasih seadanya karena sudah rela lelah mengelola perpustakaan dan karena tidak mungkin membina tanpa memberi dana.

Pada tahun 2009 ini, KPADJS menganggarkan dana sekitar Rp60.000.000,00 untuk kegiatan pembinaan perpustakaan kelurahan. Dana ini sangat kecil untuk membiayai insentif per bulan bagi pengelola 18 perpustakaan kelurahan yang terdaftar, penyelenggaraan seminar dan sosialisasi perpustakaan kelurahan, untuk membayar pembicara yang diundang, dll selama satu tahun. Untuk tahun ini, KPADJS mengaku dana yang dianggarkan untuk pembinaan perpustakaan kelurahan memang tidak banyak karena dana yang diterima KPADJS secara keseluruhan memang tidak banyak sehingga KPADJS harus membagi-bagi alokasi dana untuk kebutuhan lainnya juga. Jadi yang bisa dilakukan oleh KPADJS sejauh ini memang baru sebatas menjalankan rencana yang sudah dianggarkan dari tahun 2008. Walaupun ingin memberikan dana lebih, namun KPADJS tetap tidak dapat melanggar ketentuan atau bertindak sembarangan di luar yang sudah direncanakan karena dapat terkena sanksi. Apalagi penegakan hukum dalam hal keuangan belakangan ini sangat tegas. Namun, untuk tahun depan, KPADJS akan berusaha menganggarkan dana lebih besar lagi untuk pembinaan perpustakaan kelurahan.

Untuk memastikan pernyataan kedua belah pihak di atas, peneliti mengonfirmasi hal tersebut kepada Ibu Ine. Menurut Ibu Ine, pernyataan Ibu Ani

memang benar. KPADJS selalu memberikan insentif setiap bulan kepada para pengelola perpustakaan kelurahan. Pembayaran insentif ini dilakukan setiap tiga bulan sekali ketika para pengelola menyerahkan laporan triwulan kepada KPADJS. Namun, pada periode terakhir ini, terjadi perbedaan dalam hal nominal daripada periode-periode sebelumnya. Apabila pada periode sebelumnya para pengelola biasanya mendapatkan jatah insentif sebesar Rp113.000,00/bulan dan dibayarkan dalam waktu tiga bulan sehingga sekali memperoleh insentif, pengelola mendapat uang sebesar Rp339.000,00, pada periode triwulan terakhir, para pengelola hanya mendapatkan jatah insentif sejumlah Rp113.000,00/triwulan. Ini berarti pada tiap bulannya, mereka hanya memperoleh jatah uang sekitar Rp40.000,00 saja. Itu pun dihitung per perpustakaan, bukan per petugas. Jadi apabila satu perpustakaan kelurahan terdiri dari lebih dari satu pengelola, maka uang sebesar Rp40.000,00 tersebut harus dibagi-bagi sesuai jumlah pengelolanya.

Sementara itu, dari pihak kelurahan, pengelola tidak mendapat dana karena memang tidak ada dana khusus yang dianggarkan untuk perpustakaan. Namun, masih menurut Ibu Ine, lurah tidak sama sekali mengabaikan perpustakaan kelurahan. Lurah masih menunjukkan dukungan dalam bentuk dana yang diberikan secara insidental apabila Ibu Ine meminta dana. Pada tahun 2008 lalu, lurah pernah memberikan dana sebesar Rp200.000,00 yang bisa digunakan untuk membeli beberapa lampu neon yang sudah rusak di ruangan perpustakaan. Menurut Ibu Ine, dana ini kemungkinan merupakan dana pribadi lurah. Sedangkan pada tahun 2009, lurah pernah memberikan dana sebesar Rp500.000,00 yang bisa digunakan untuk memperbaiki rak yang dimakan rayap. Kalau dana ini, kemungkinan berasal dari dana kelurahan karena dana Ibu Ine dapatkan dari bendahara kelurahan. Bentuk dukungan lurah dalam hal dana juga ditunjukkan dengan pemberian izin bagi Ibu Ine untuk memanfaatkan kendaraan kelurahan untuk dipakai ketika apabila Ibu Ine harus menghadiri undangan yang berhubungan dengan kegiatan perpustakaan kelurahan atau pun PKK dan PAUD. Namun, apabila lurah sedang tidak ada biasanya Ibu Ine menggunakan uang pribadi dan meminta ganti kepada lurah di kemudian hari. Lurah tidak keberatan untuk mengganti uang transportasi tersebut.

Hal inilah yang terjadi apabila perpustakaan menjadi bergantung kepada bantuan pemerintah atau sumbangan pihak-pihak yang dermawan karena inilah yang menjadi potensi kegagalan suatu perpustakaan. Seperti banyak diketahui bahwa di negara-negara berkembang, kedermawanan masih langka karena masyarakatnya masih mengutamakan pencapaian kemakmuran (Chowdhury, 2008).

4.2.3 Kesempatan

4.2.3.1 Kebijakan Pemerintah di Bidang Perpustakaan

Hal yang berhubungan dengan kebijakan pemerintah sejatinya hanya KPADJS yang paling memahami. Oleh karena itu, seluruh pertanyaan mengenai payung hukum atau kebijakan pemerintah di bidang perpustakaan diajukan hanya kepada Ibu Ani kembali. Ketika peneliti menanyakan perihal keberlangsungan perpustakaan kelurahan kepada Ibu Ani, ia tidak menyalahkan beberapa pendapat orang yang menganggap perpustakaan kelurahan lebih baik ditutup saja karena tidak berjalan efektif dan hanya mempermalukan dunia perpustakaan karena Ibu Ani menyadari sulitnya usaha pengembangan perpustakaan kelurahan. Menurut Ibu Ani, tuntutan terhadap perpustakaan kelurahan ini begitu banyak, akan tetapi tidak diikuti dengan sumber daya yang memadai, baik dari segi manusia mau pun dari segi dana. Namun, di atas permasalahan dana dan SDM, sebenarnya yang paling menjadi permasalahan utama adalah ketidakberadaan payung hukum yang jelas mengenai perpustakaan kelurahan.

Selama ini, peraturan yang ada mengenai perpustakaan, khususnya perpustakaan kelurahan dirasa kurang tegas. Seperti misalnya SK Gubernur No. 82 tahun 2004 tentang Perpustakaan Kelurahan. Isi yang terkandung dalam SK ini selain tidak tegas karena tidak terdapat sanksi, juga terdapat pasal-pasal yang sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini. Seperti telah dijelaskan oleh Bapak Abdul pada bahasan sebelumnya, pasal mengenai pendanaan yang mengatakan bahwa salah satu sumber pendanaan bagi perpustakaan kelurahan berasal dari APPKK sudah tidak bisa dijalankan lagi karena APPKK sekarang sudah tidak ada. Apalagi dengan budaya di kalangan PNS yang cenderung tidak terlalu menganggap serius SK Gubernur karena hanya berupa petunjuk pelaksanaan kerja

semata. Menurut Ibu Ani, selama ini banyak sekali SK gubernur yang diterbitkan. Akan tetapi, banyak juga yang tidak dipatuhi. Biasanya kalangan PNS akan lebih menganggap serius perda dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi lainnya.

Untuk mengatasi permasalahan ini, Ibu Ani berujar bahwa *“Sekarang ini baru mau dibuat peraturan yang lebih jelas dan tegas tentang perpustakaan kelurahan bahwa pengelola perpustakaan kelurahan akan diberikan honor sebesar Rp1.000.000,00 dan ditetapkan sanksi bagi yang tidak menjalankan SK tersebut. Peraturan honorarium dan sanksi ini akan dilampirkan dalam SK tersebut. Jadi lebih jelas. Kalau yang sebelumnya kan hanya SK Gubernur tanpa lampiran dan penjelasan lebih lanjut. Selama ini kan nggak ada orang yang mau menggaji. Mana ada orang yang mau kerja cuma-cuma.”* Besaran nominal ini disesuaikan dengan UMT. Sehingga diharapkan dengan adanya bayaran seperti ini, pengelola dapat lebih termotivasi dalam mengembangkan perpustakaan kelurahan. Peraturan ini disusun oleh pihak BPADKI Jakarta dan rencananya akan selesai pada tahun 2010, paling lambat 2011.

KPADJS dan BPADKI Jakarta sedang berusaha mengajukan rencana upah ini menjadi ABT (Anggaran Belanja Tambahan). Setelah lolos ABT, barulah peraturan ini dapat dikeluarkan karena apabila usulan ABT ini disetujui dan pendirian perpustakaan menjadi suatu hal yang wajib maka biaya pengembangan perpustakaan kelurahan akan otomatis diberikan oleh pemerintah.

Seburuk apa pun kondisi perpustakaan, tidak semudah itu KPADJS membubarkan perpustakaan kelurahan karena urusan perpustakaan kelurahan sudah menjadi instruksi gubernur. Menurut Ibu Ani, perpustakaan kelurahan masih memiliki harapan dan kesempatan untuk mengembangkan diri asalkan pihak-pihak yang terkait mau sama-sama berjuang. Yang penting adalah dikeluarkannya peraturan yang lebih jelas barulah kita bisa banyak berbuat.

Mengenai hal tersebut di atas, Sutarno (2008) menerangkan bahwa untuk membentuk perpustakaan desa/kelurahan yang kuat sebaiknya didasarkan pada landasan legal formal atau landasan hukum. Selain itu, untuk melaksanakan kegiatannya berdasarkan landasan operasional yang ditetapkan oleh pejabat yang bersangkutan. Penerapan teori ini di lapangan adalah dengan sudah adanya UU

No.43 tahun 2007 tentang Perpustakaan sebagai landasan legal formal atau landasan hukum yang di dalamnya menjelaskan poin mengenai instruksi pendirian perpustakaan tingkat daerah termasuk di dalamnya perpustakaan kelurahan. Sementara itu, landasan operasionalnya adalah SK Gubernur yang sedang dalam proses revisi ke sekian kalinya.

4.2.3.2 Perhatian Pemerintah terhadap Perpustakaan Kelurahan

Pada beberapa bulan belakangan ini, telah diselenggarakan lomba kelurahan terbaik. Menurut Ibu Ani, *salah satu penilaiannya adalah keberadaan perpustakaan kelurahan, di samping penilaian lain yaitu keberadaan PKK, PAUD, karang taruna, dll.* Dari kenyataan ini, paling tidak sudah terlihat perhatian pemerintah terhadap keberadaan perpustakaan di kelurahan. Walaupun pada prakteknya, menurut Ibu Ani, kelurahan-kelurahan itu hanya mengadakan perpustakaan seadanya sebatas untuk mendapatkan penilaian lebih dalam perlombaan tersebut. Setelah penilaian itu, tidak diketahui keberlangsungan perpustakaan diadakan tersebut.

Untuk menilai perpustakaan kelurahan manakah yang memang benar-benar dikelola dengan baik, pada triwulan kedua tahun 2009 ini, akan diselenggarakan lomba perpustakaan kelurahan terbaik tingkat propinsi. Jadi dalam lomba kali ini, KPADJS tidak bertindak sebagai penilai/juri, melainkan sebagai pihak yang akan mengajukan tiga perpustakaan kelurahan yang dinilai paling aktif di Jakarta Selatan. Kriteria perpustakaan kelurahan aktif antara lain pengelolanya selalu datang, fisik dan administrasinya rapi, pengunjungnya banyak. Kondisi ini akan dimonitor oleh Perpustakaan DKI Jakarta secara rutin dan tanpa pemberitahuan agar dapat melihat kondisi perpustakaan kelurahan yang sebenarnya sehingga dapat diketahui kebutuhan masing-masing perpustakaan kelurahan untuk kemudian dipenuhi kebutuhan tersebut.

Pengawasan tanpa pemberitahuan ini dimaksudkan untuk menghindari kebohongan atau kepura-puraan para pengelola. Dengan sistem ini diharapkan KPADJS dapat menangkap kondisi yang sebenarnya di lapangan karena apabila disampaikan pemberitahuan terlebih dahulu, biasanya pengelola akan menyiapkan kondisi prpustakaan sehingga tidak akan didapatkan gambaran kondisi sehari-hari

yang sebenarnya. Dalam hal ini, peneliti juga mengalami hal serupa. Setiap kali peneliti datang tanpa pemberitahuan ke beberapa perpustakaan kelurahan, maka setiba di tempat yang dimaksud, biasanya perpustakaan-perpustakaan kelurahan itu berada dalam kondisi tertutup. Namun, apabila peneliti datang dengan pemberitahuan terlebih dahulu, biasanya ketika peneliti tiba, pengelola juga sudah tiba. Penilaian seperti ini tidak akan efektif. Oleh karena itu, perpustakaan kelurahan yang memang benar-benar aktif akan diusahakan untuk mendapatkan UMT.

Dari penjelasan Ibu Ani di atas, dapat diketahui bahwa pemerintah DKI Jakarta dan KPADJS khususnya, sudah melaksanakan konsep pembinaan perpustakaan kelurahan yang dicanangkan sebagai gerakan nasional. Setiap unsur pemerintah daerah secara berjenjang dan serentak perlu memantau pelaksanaan gerakan tersebut (Sutarno, 2008).

4.2.3.3 Dukungan Lurah

Khusus Lurah Perpustakaan kelurahan TP yaitu Bapak Abdul dapat dikatakan cukup mendukung penyelenggaraan perpustakaan. Selain dalam bentuk pemberian dana sekali waktu saat Ibu Ine membutuhkan seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, Bapak Abdul juga mendukung pengadaan SDM di perpustakaan kelurahan TP dengan cara akan menunjuk salah seorang pengurus PKK/karyawan kelurahan untuk membantu Ibu Ine. Menurutnya, *“Sesuai SK aja, nanti saya tunjuk ketua pelaksana dari staf kelurahan. Tugasnya mengarahkan sekretaris ini, minimal kalau nggak ada Bu Ine ada dia gitu. Jadi bisa ngebukain pintu.”*

Bapak Abdul juga mengaku tidak keberatan membantu lebih dalam hal dukungan dana asalkan ada peraturan yang menjelaskan kewenangan kelurahan atas hal itu. Pengakuan Bapak Abdul ini dibenarkan oleh Ibu Ani dan Ibu Ine. Menurut Ibu Ani, lurah TP memang cukup membantu Perpustakaan Kelurahan TP. Sedangkan menurut Ibu Ine, dukungan yang diberikan Lurah TP tidak terlepas dari status Perpustakaan Kelurahan TP yang sudah menjadi perpustakaan percontohan.

Pernyataan-pernyataan tersebut di atas sejalan dengan pendapat Sutarno (2008) yang mengatakan bahwa maju mundurnya perpustakaan berada dalam pundak lurah dan perangkatnya. Di sisi lain, kemajuan perpustakaan kelurahan, secara langsung atau tidak langsung, ikut membawa nama baik kelurahan yang bersangkutan. Hal ini terlihat dari lomba kelurahan yang salah satu penilaiannya adalah keberadaan perpustakaan di kelurahan tersebut sebagaimana yang sudah peneliti uraikan sebelumnya. Walaupun baru menjadi salah satu kriteria penilaian, namun paling tidak hal ini sudah menunjukkan adanya perhatian pemerintah terhadap keberadaan perpustakaan terutama di kelurahan.

4.2.4 Ancaman

4.2.4.1 Jarak/celah antara perpustakaan dan masyarakat

Menurut Bapak Abdul, salah satu penyebab masyarakat jarang berkunjung ke perpustakaan kelurahan karena letaknya yang ada di kelurahan. Masyarakat pada umumnya masih melihat kelurahan sebagai suatu kantor yang tidak harus dikunjungi apabila tidak harus mengurus keperluan kependudukan. Perasaan ini membuat masyarakat merasa malas dan segan berkunjung ke kelurahan, apalagi ke perpustakaan. Jangankan untuk ke perpustakaan yang letaknya di kelurahan, untuk mengurus keperluan kependudukan ke kelurahan pun masyarakat masih banyak yang malas. Padahal urusan kependudukan merupakan hal yang wajib mereka saja sudah malas, apalagi hanya sekadar untuk ke perpustakaan. Sebenarnya pihak kelurahan sudah berusaha mengajak masyarakat untuk memanfaatkan kelurahan, misalnya untuk berolah raga, berkumpul, dll. Usaha ini cukup berhasil mendekatkan kelurahan dengan masyarakat, namun belum cukup berpengaruh terhadap pemanfaatan perpustakaan.

Orang dewasa saja malas ke perpustakaan di kelurahan apalagi anak-anak yang masih takut untuk ke kelurahan. Bapak Abdul berkata bahwa *“Saya sih udah nyuruh warga manfaatin perpustakaan, tapi kan kenyataannya. Kita sih bisa bangun perpustakaan, tapi masalahnya adalah efektif apa nggak? Karena kalau di kelurahan kan, orang males dan segan dateng. Padahal kita udah terbuka banget ya, tapi mereka tetep segan. Tapi ya sekarang mulai kita tanamkan bahwa perpustakaan itu milik masyarakat.”* Oleh karena itu, lurah mengusulkan untuk

memindahkan perpustakaan ke tengah-tengah masyarakat, seperti misalnya di taman tempat anak-anak bermain sehingga anak-anak dapat memanfaatkan perpustakaan kapan pun mereka mau. Selama ini salah satu kendala yang dihadapi perpustakaan kelurahan adalah jam buka perpustakaan yang disesuaikan dengan jam buka kelurahan. Padahal, anak-anak sangat sungkan masuk ke kelurahan.

Bapak Abdul memiliki ide untuk mengintegrasikan perpustakaan dengan taman bermain, tempat posyandu, dan kegiatan kemasyarakatan lainnya. Namun, kendalanya adalah pembebasan lahan yang hingga kini belum terealisasi. Bapak Abdul berharap dengan idenya ini perpustakaan akan lebih termanfaatkan oleh masyarakat karena konsepnya dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat sehingga perpustakaan tidak melulu menjadi urusan kelurahan. Dengan cara ini, Bapak Abdul berharap masyarakat dapat merasa dekat dan memiliki perpustakaan yang ada di lingkungannya. Bapak Abdul berujar mengenai pendirian perpustakaan yang dapat saja dilakukan oleh banyak orang. Namun, masalahnya adalah mengenai keefektifan perpustakaan kelurahan yang sudah ada.

Djoko Kirmanto (2000) memang pernah mengungkapkan bahwa perpustakaan yang berada di tengah-tengah pemukiman seharusnya menempati lokasi yang strategis dan terintegrasi dengan bangunan layanan umum primer lain, sehingga dapat dijangkau bersama kepentingan lainnya. Layanan primer yang dimaksud kemungkinan adalah kantor kelurahan, namun bisa juga tempat yang menjadi sarana sosialisasi masyarakat seperti taman bermain misalnya.

4.2.4.2 Respon dan Perhatian Masyarakat yang Relatif Rendah

Bapak Abdul berujar sudah berusaha mengajak masyarakat untuk lebih memanfaatkan kelurahan sebagai fasilitas masyarakat, khususnya perpustakaan. Namun, respon masyarakat sangatlah rendah bahkan seperti acuh tak acuh. Begitu pula dengan Ibu Ani yang mengaku kesulitan menarik perhatian masyarakat terhadap perpustakaan, terutama perpustakaan kelurahan. Ibu Ani mengakui promosi tentang perpustakaan kelurahan sangatlah kurang. Banyak masyarakat yang belum mengetahui bahwa ada yang namanya perpustakaan kelurahan. Cara sosialisasi yang harus mereka lakukan, menurut Ibu Ani adalah "*Kita sering mengadakan apresiasi seperti seminar tentang perpuskel, tapi masyarakat yang*

kita undang. Syaratnya diundang, karena kalau tidak diundang mungkin nggak akan datang.”

Perpustakaan dan masyarakat secara teoritis semestinya memiliki hubungan yang erat karena di antara keduanya saling membutuhkan dan saling melengkapi. Maksudnya bahwa keberadaan perpustakaan adalah dalam rangka menyediakan informasi dan memenuhi kebutuhan pemakainya. Akan tetapi, pada kenyataannya, antara keduanya seolah-olah berjalan sendiri-sendiri. Maksudnya, penyelenggaraan perpustakaan, dengan maksud dan tujuan untuk melayani masyarakat. Namun, sebaliknya masyarakat mungkin saja belum mengetahui, memahami, dan menyadari apa arti dan kegunaan perpustakaan (Sutarno, 2006).

Oleh karena itu, Ibu Ani sempat terpikir untuk mengadakan seminar tentang perpustakaan kelurahan, namun yang diundang adalah masyarakat, bukan pengelola seperti yang biasa dilakukan. Masyarakat harus diundang karena kalau hanya diberi pengumuman biasanya hanya sedikit yang akan datang, kalau perlu sambil diadakan acara yang menarik agar masyarakat mau datang.

4.2.4.3 Minat Masyarakat terhadap Perpustakaan Relatif Rendah

Menurut Ibu Ine, salah satu penyebab rendahnya pemanfaatan perpustakaan kelurahan adalah minat baca masyarakat Indonesia yang juga masih rendah. Menurutnya, *orang Indonesia kalau belum terpaksa maka akan males baca dan belajar, apalagi ke perpustakaan.*

Ibu Ani memberi contoh pada saat pelaksanaan penilaian perpustakaan kelurahan terbaik. Pada saat itu, perpustakaan kelurahan terlihat ramai dikunjungi. Namun, pada kenyataannya, para pengunjung tersebut diminta datang untuk mengesankan bahwa perpustakaan kelurahan tersebut banyak pengunjungnya. Hal ini menunjukkan bahwa kedatangan pengunjung ke perpustakaan saat itu bukan karena keinginan mereka sendiri dan tidak mencerminkan suasana perpustakaan sehari-hari. Hal ini pun dirasakan oleh peneliti karena peneliti jarang bertemu dengan pengguna setiap kali peneliti datang ke Perpustakaan Kelurahan Tegal Parang.

Menurut Djoko Kirmanto (2000), minat baca masyarakat yang masih rendah terkait langsung dengan tingkat pendapatan rata-rata masyarakat, dan tidak terlepas dari sistem pendidikan baik formal maupun informal yang kurang

mendorong anak didik untuk memperkaya pengetahuannya melalui bacaan. Hal ini terutama lebih banyak terjadi di negara-negara berkembang yang masih berkonsentrasi pada pencapaian kemakmuran daripada peningkatan kebiasaan membaca.

4.2.4.4 Status dan Kedudukan Perpustakaan

Ketika ditanya perihal hasil survei terhadap beberapa perpustakaan kelurahan yang didatanginya beberapa waktu lalu, Ibu Ani menjelaskan bahwa hasilnya mengecewakan karena rata-rata kondisinya sangat sederhana dan seadanya. Begitu pula dengan Perpustakaan Kelurahan TP. Walaupun perpustakaan ini merupakan perpustakaan kelurahan percontohan, namun kondisinya tidaklah luar biasa.

Kondisi yang seadanya semakin diperparah dengan peletakan ruangan perpustakaan kelurahan di ruangan yang sempit di lantai tiga yang jarang didatangi orang. Kalau ada keperluan kelurahan, perpustakaan harus mengalah dan mengepak koleksinya. Hal ini karena keterbatasan ruangan di kelurahan karena semua kantor kelurahan di Jakarta Selatan sudah terstandar sama dan tidak termasuk di dalamnya ruangan yang diperuntukkan untuk perpustakaan. Keadaan ini sebenarnya tidak terlepas dari status dan kedudukan perpustakaan di dalam kelurahan. Seperti penjelasan yang diungkapkan Bapak Abdul, perpustakaan bukanlah tupoksi kelurahan sehingga walaupun letaknya menyatu dengan kelurahan, namun tidak bisa disamakan dengan bagian-bagian lain di kelurahan. Menurut pendapat lurah ketika diwawancarai *“Ya masalahnya kewenangnya gitu. Kalau memang dibebankan ke kelurahan, ya yang jelas aja gitu. Kita nggak akan sungkan. Karena kewenangan saya tuh di bidang kebersihan, kesehatan, dan ketertiban. Kan nggak nyambung sama ini. Karena di luar tiga kewenangan ini, kita hanya menganggarkan untuk TAL (air listrik) dan administrasi kelurahan seperti ATK, pengadaan peralatan kantor. Begitu.”*

Ibu Ani berpendapat inilah yang membuat penempatan ruangan perpustakaan seringkali dinomorduakan di bawah kebutuhan kelurahan. Seharusnya perpustakaan diletakkan di lantai satu, namun karena standar pelayanan kelurahan harusnya berada di lantai satu maka akhirnya perpustakaan

harus mengalah dan dipindahkan ke tempat yang kurang strategis di kantor kelurahan.

Selain itu, Ibu Ani mengaku KPADJS sudah menginstruksikan kelurahan untuk mendirikan perpustakaan, namun tidak terlalu dihiraukan. Mengenai permasalahan ini, Bapak Abdul berpendapat bahwa keberadaan perpustakaan tidak membawa pengaruh terhadap penilaian kinerja lurah. Perpustakaan kelurahan menang lomba atau tidak, lurah tidak bermasalah sedikit pun.

Ketidakjelasan status perpustakaan kelurahan terutama dalam hal pendanaan mengakibatkan tidak adanya pihak yang merasa bertanggung jawab penuh terhadap keberlangsungan perpustakaan kelurahan. Lurah menyerahkan tanggung jawab kepada KPADJS. Kelurahan hanya memberikan fasilitas dan membantu pergerakannya dalam bentuk menghimpun swadaya masyarakat untuk menyumbang buku ke perpustakaan. Setelah itu menarik minat baca masyarakat. Untuk itu, kelurahan bekerja sama dengan kepala sekolah di TP. Di lain pihak, KPADJS memang mengakui bahwa tanggung jawab pembinaan perpustakaan kelurahan berada di pundaknya. Namun, KPADJS juga tidak bisa banyak membantu karena tidak memiliki anggaran dana yang bisa digunakan untuk pendirian dan pengembangan perpustakaan kelurahan ke depannya. Oleh karena itu, pengelola harus tahu diri dalam menempatkan diri di kelurahan karena walaupun gubernur telah mengizinkan pendirian perpustakaan kelurahan, namun tetap lurah yang berhak mengizinkan pemberian lahan untuk perpustakaan kelurahan.

Penjelasan Sutarno (2006) terhadap kondisi seperti dijelaskan di atas adalah bahwa status dan kedudukan perpustakaan di dalam suatu organisasi merupakan suatu hal yang penting. Sebab hal itu akan ikut menentukan kinerja dan wibawa perpustakaan. Karena status dan kedudukan perpustakaan kelurahan belum jelas maka perpustakaan kelurahan kesulitan menampilkan kinerja terbaiknya karena kurang dukungan dari pihak-pihak terkait. Hal ini terlihat dari kurang optimalnya dukungan lurah ini karena menurut Bapak Abdul kalau Bapak Abdul diundang ke perpumda, biasanya Bapak Abdul menyuruh pengelola perpustakaan kelurahan yang datang. Jawaban Bapak Abdul ini diperjelas dengan jawaban Ibu Ani yang mengatakan bahwa memang ada kebiasaan di kalangan

pegawai pemerintahan, apabila terdapat surat undangan kepada pimpinan biasanya langsung didisposisi kepada bawahan. Pendisposisian ini biasa dilakukan terhadap surat-surat yang tidak terlalu dianggap penting. Dari sini terlihat bahwa urusan perpustakaan dianggap sebagai urusan yang tidak terlalu penting, kemungkinan menurut Ibu Ani, hal ini terjadi karena perpustakaan identik dengan organisasi yang tidak menghasilkan uang sebagaimana urusan kelurahan lainnya, namun justru malah menghabiskan uang yang belum tentu diikuti dengan peningkatan efektivitas perpustakaan kelurahan.

4.3 Solusi

Agar tidak hanya berhenti pada pengenalan permasalahan seputar perpustakaan kelurahan, maka peneliti juga menanyakan kepada para informan, hal-hal yang kiranya dapat menjadi solusi dari permasalahan di atas. Solusi-solusi yang didasarkan pada jawaban para informan, antara lain:

1. Untuk mengawasi dan membina perpustakaan kelurahan sebaiknya KPADJS melakukan survei secara rutin dan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada para pengelola maupun pihak kelurahan. Dengan cara seperti ini, Ibu Ani berharap hasil penilaian yang didapat merupakan hasil yang konkret dan sesuai dengan keadaan perpustakaan kelurahan sehari-hari bukan keadaan yang dibuat-buat karena tahu akan diperiksa. Selanjutnya, menurut Ibu Ine dari hasil penilaian itu pasti akan terlihat perpustakaan mana saja yang benar-benar beroperasi dan seluruh pendanaan perpustakaan kelurahan tidak perlu lagi dibagi-bagi kepada banyak perpustakaan kelurahan, namun cukup difokuskan pada perpustakaan-perpustakaan kelurahan yang benar-benar aktif. Dalam hal ini seleksi alam memang akan terjadi. Perpustakaan-perpustakaan awalnya didirikan dalam jumlah banyak. Namun, semua kembali kepada usaha dan loyalitas pihak-pihak yang terkait untuk terus menjaga keberlangsungan perpustakaan kelurahan.
2. Menurut Ibu Ine, yang paling penting agar pengelolaan perpustakaan kelurahan dapat berjalan dengan lancar adalah kedisiplinan pengelola dan kepedulian lurah. Dua aspek inilah yang menentukan maju mundurnya perpustakaan kelurahan. Apabila salah satu saja tidak disiplin atau tidak peduli, maka keberlangsungan perpustakaan kelurahan akan sulit

dipertahankan. Kedisiplinan pengelola perlu ditingkatkan karena penataran pengelola menghabiskan dana. Sayang kalau tidak memberikan dampak bagi pengembangan perpustakaan kelurahan.

3. Pemilihan SDM juga memegang peran penting. Sebaiknya pengelola perpustakaan kelurahan adalah orang yang tidak berkaitan langsung dengan kelurahan. Dengan kata lain, hindari penunjukan karyawan kelurahan sebagai pengelola perpustakaan kelurahan karena dapat dipastikan kinerjanya tidak akan maksimal. Pengelola yang sekaligus menjabat sebagai karyawan kelurahan akan terbagi fokus pekerjaannya menjadi dua dan biasanya yang akan menjadi korban adalah perpustakaan kelurahan karena menjadi pengelola perpustakaan tidak menghasilkan uang. Inilah yang menjadi penyebab banyaknya perpustakaan kelurahan akhirnya tidak jelas keberadaannya karena ditinggal oleh pengelolanya. Tidak hanya sebatas orang luar kelurahan, namun pengelola perpustakaan kelurahan sebisa mungkin mereka yang memiliki banyak waktu luang, seperti pensiunan, ibu rumah tangga, atau pun pekerja tidak terikat lainnya. Namun, yang paling penting, pengelola perpustakaan kelurahan haruslah orang yang berjiwa sosial dan tertarik pada dunia buku karena menjadi pengelola perpustakaan kelurahan tidak dibayar dan hanya diberikan insentif yang tidak seberapa.
4. Salah satu penyebab pengelola perpustakaan kelurahan memutuskan untuk berhenti menjadi pengelola perpustakaan kelurahan adalah karena mereka seringkali merasa jenuh. Menurut Ibu Ine, rasa jenuh ini terjadi karena pengelola harus menjaga perpustakaan yang sepi pengunjung dalam waktu lama dan selain itu juga harus mengerjakan pekerjaan yang sama secara terus-menerus dalam jangka waktu bertahun-tahun. Sebenarnya pekerjaan rutin itu tidak akan menjenuhkan jika pengelola mau mencicil pekerjaannya. Yang membuat mereka merasa jenuh melakukannya karena mereka terbiasa menunda pekerjaan dan ditumpuk di belakang. Hal inilah yang membuat pengelola perpustakaan sering merasa jenuh.
5. Penyelenggaraan perpustakaan kelurahan seharusnya menjadi salah satu kategori penilaian kinerja lurah sehingga dapat memacu lurah dalam mengembangkan perpustakaan yang ada di wilayahnya. Menurut Ibu Ine,

perlu disadari oleh lurah bahwa perpustakaan merupakan sarana penunjang layanan publik yang dapat meningkatkan kualitas masyarakatnya apabila perpustakaan dikelola dengan baik.

6. Salah satu penyebab rendahnya minat masyarakat terhadap perpustakaan adalah rendahnya minat baca masyarakat tersebut. Sebenarnya rendahnya minat baca ini disebabkan oleh kurangnya pembiasaan orang tua terhadap anak untuk membaca buku. Pengunjung yang peneliti wawancarai mengaku bahwa yang menjadi anggota di perpustakaan kelurahan memang dirinya, namun yang berkeinginan besar meminjam buku di perpustakaan adalah anaknya. Minat baca anaknya yang tinggi ini karena dibiasakan oleh orang tua dan pengaruh pertemanan.
7. Di luar semua solusi dari segala permasalahan di atas, yang paling penting untuk diusahakan adalah kejelasan payung hukum yang mengatur seluruh aspek penyelenggaraan perpustakaan kelurahan. Mulai dari tata cara pendiriannya, aturan dalam hal koleksi dan sarana prasarana, penentuan wewenang, pendanaan, pembinaan, sekaligus sanksi yang akan dikenakan apabila terjadi pelanggaran atau ketidakpatuhan. Sesungguhnya ketidakjelasan payung hukum inilah yang membuat penyelenggaraan perpustakaan kelurahan menjadi tidak maksimal. Bapak Abdul sebagai lurah mengaku tidak akan keberatan untuk mendukung pendanaan perpustakaan kelurahan asalkan sudah jelas ketentuannya agar ia dapat bertindak tegas tanpa khawatir terjatuh sanksi karena melanggar wewenang. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Ibu Ani.
8. Yang terakhir adalah usulan dari pihak kelurahan untuk mengubah konsep perpustakaan kelurahan menjadi taman baca masyarakat. Menurut Menurut Bapak Abdul, konsep ini akan lebih efektif karena penyelenggaraannya dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kemandirian ini diharapkan juga menyangkut soal pendanaan yang akan diserahkan kepada masyarakat sehingga perpustakaan tidak lagi bergantung pada pemerintah. Pemerintah hanya bertugas melakukan pembinaan. Selain itu, lokasinya pun sebaiknya berada di tengah masyarakat bukan di kantor kelurahan. Letaknya yang ada di tengah lapangan misalnya diharapkan dapat mendekatkan masyarakat dengan

perpustakaan sehingga perpustakaan pun akan lebih dimanfaatkan daripada ketika berada di kelurahan.

4.4 Hasil Temuan

Penelitian terhadap keberlangsungan perpustakaan kelurahan yang dilakukan di Perpustakaan Kelurahan Tegal Parang menghasilkan beberapa temuan yang berhubungan dengan permasalahan yang dihadapi suatu perpustakaan kelurahan. Temuan-temuan tersebut mencakup beberapa aspek yang bersinggungan dengan penyelenggaraan perpustakaan kelurahan, yaitu dari segi SDM, sarana prasarana, dana, kebijakan, pengawasan, dll. Untuk menganalisis keberlangsungan perpustakaan kelurahan, kita perlu melakukan analisis SWOT sehingga dapat diketahui apakah suatu perpustakaan perlu diperbesar, diperkecil, atau malah ditiadakan saja.

Analisis SWOT yang dilakukan terhadap Perpustakaan Kelurahan Tegal Parang diketahui bahwa perpustakaan ini memiliki kelebihan yaitu pada aspek pengelola yang loyal, koleksinya banyak dan sarana prasarananya lengkap, cukup banyak pengunjungnya, lingkungan kelurahan mendukung dan lokasi perpustakaan cukup strategis, berhasil menjalin mitra dengan beberapa institusi yang bersedia memberikan sumbangan dalam bentuk koleksi atau pun perangkat perpustakaan, melakukan layanan paket, dan kegiatan administrasi yang berjalan baik. Selain kelebihan, perpustakaan ini juga memiliki kelemahan antara lain kekurangan SDM, tidak memiliki sumber koleksi yang jelas, pengawasan dan pembinaan masih kurang karena restrukturisasi karyawan yang baru saja terjadi, dan sudah tidak adanya sumber dana seperti yang tercantum dalam SK Gubernur No.82 tahun 2004.

Kelemahan di atas diperparah dengan ancaman yang dihadapi oleh perpustakaan ini antara lain masyarakat merasa malas dan segan datang ke kelurahan apalagi ke perpustakaan yang tidak terlalu mendesak kebutuhannya, masyarakat merasa tidak membutuhkan perpustakaan walaupun sudah dilakukan promosi terhadap layanan perpustakaan, minat baca masyarakat Indonesia masih rendah apabila belum merasa terpaksa membaca maka akan males membaca,

perpustakaan tidak memiliki status dan kedudukan yang jelas di dalam kelurahan. Namun, di antara kelemahan dan ancaman yang dihadapi oleh perpustakaan ini, ternyata masih terdapat kesempatan yang dapat menjadi harapan bagi keberlangsungan Perpustakaan Kelurahan Tegal Parang yaitu sedang disusun SK terbaru yang lebih jelas mengatur penyelenggaraan perpustakaan kelurahan, mulai diperhatikannya perpustakaan kelurahan oleh pemerintah, serta adanya dukungan lurah.

